



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
MEMBAHAS EVALUASI DAN USULAN
PERUBAHAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2015
TANGGAL 11 JUNI 2015**

Tahun Sidang	: 2014– 2015
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 8 (delapan).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Kamis, 11 Juni 2015.
Pukul	: 14.00 s/d 15.15 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
Acara	: Evaluasi dan Usulan Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015
Ketua Rapat	: Dr. H. Sarehwiyono, SH., M.H..
Sekretaris	: Widiharto, SH.,MH.
Hadir	: 40 orang, izin 12 orang dari 74 orang Anggota.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka evaluasi dan usulan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Anggota untuk memberikan masukan/pandangan mengenai evaluasi dan usulan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Pimpinan Badan Legislasi /Ketua Rapat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 1. Badan Legislasi telah menerima surat dari Pimpinan Komisi X, Pimpinan Komisi IX, Pimpinan Komisi IV, dan surat yang diajukan oleh 27 (dua puluh tujuh) orang Anggota Komisi II terkait dengan usulan RUU yang belum masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.

2. Komisi X mengusulkan penambahan RUU tentang Kebudayaan untuk masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, mengingat pada tahun 2015 RUU dari Komisi X yang masuk dalam RUU Prioritas hanya 1 (satu) RUU yaitu RUU tentang Sistem Perbukuan.
 3. Komisi IX mengusulkan penambahan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga agar masuk ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 atau Prioritas Tahun 2016.
 4. Mengingat dalam Prolegnas 2015 sudah ada 2 (dua) RUU usulan Komisi IX, maka usulan RUU tersebut bisa dipertimbangkan untuk penyusunan Prolegnas Tahun 2016.
 5. RUU bidang tugas dari Komisi IV yang masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 ada 2 (dua) RUU yaitu RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan RUU tentang Kedaulatan Pangan (Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan), namun karena Komisi IV tidak mengusulkan RUU tentang Kedaulatan Pangan, maka Komisi IV lebih memprioritaskan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dalam Prolegnas 2015.
 6. Terhadap usulan 27 (dua puluh tujuh) Anggota Komisi II yang mengusulkan Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, sebelum dilakukan harmonisasi di Badan Legislasi harus dimasukkan terlebih dahulu dalam Prolegnas 2015, namun karena RUU ini disampaikan kepada Pimpinan DPR dan Badan Legislasi hanya menerima surat tembusan yang tidak diikuti draft RUU dan Naskah Akademik, tentunya Badan Legislasi belum dapat memproses usulan tersebut.
- B. Tanggapan Anggota terhadap evaluasi dan usulan perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2015 sebagai berikut :
1. Komisi-komisi belum dapat melaksanakan penyusunan undang-undang yang menjadi Prioritas Tahun 2015, meskipun setiap komisi maksimal mendapat 2 (dua) undang-undang untuk disusun setiap tahun, sehingga tidak perlu dilakukan penambahan RUU usulan komisi lagi.
 2. Dengan tidak terpenuhinya target penyelesaian Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, tentu masyarakat akan menyalahkan DPR bukan Pemerintah.
 3. Komisi-komisi perlu memberikan laporan mengenai progress/kemajuan penyusunan draft RUU dan Naskah Akademik yang menjadi Prioritas Tahun 2015, hal ini diperlukan untuk mengetahui perkembangan legislasi yang dilakukan oleh DPR.
 4. Berdasarkan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, 26 (dua puluh enam) RUU merupakan inisiatif DPR, baru 4 (empat) RUU yang sedang diharmonisasi oleh Badan Legislasi dan 2 (dua) RUU telah diundangkan menjadi UU. 8 (delapan) RUU telah diterima oleh komisi-komisi Naskah Akademik dan draft RUUnya dari Deputi Bidang Perundang-undangan, sedangkan 4 (empat) RUU masih dalam proses penyusunan di Deputi Bidang Perundang-undangan. Dengan demikian, masih tersisa 8 (delapan) RUU yang belum disusun Naskah Akademik dan draft RUU oleh Komisi atau Anggota.
 5. Terhadap RUU yang belum disusun Naskah Akademik dan draft RUU nya, perlu diusulkan dilakukan kerjasama dengan universitas-universitas untuk penyelesaiannya, agar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dapat terpenuhi.
 6. Adanya usulan penambahan Prolegnas Prioritas Tahun 2015, akan semakin menambah beban DPR untuk menyelesaikan penyusunan dan pembahasan RUU pada Tahun 2015.
 7. Diusulkan agar komisi-komisi fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas legislasi yang telah ditentukan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.

8. Pelaksanaan Hari Legislasi perlu dilakukan secara konsisten oleh komisi-komisi, sehingga target Prolegnas Prioritas Tahun 2015 dapat tercapai.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pembahasan evaluasi dan usulan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

1. Badan Legislasi akan mengundang Pimpinan Komisi IX dan Komisi X untuk meminta penjelasan terkait dengan evaluasi dan usulan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.
2. RUU Kedaulatan Pangan dicabut/ditarik dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 untuk diganti dengan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2015.
3. Terhadap usulan 27 (dua puluh tujuh) Anggota Komisi II yang mengusulkan Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, Badan Legislasi belum dapat memproses usulan tersebut dalam perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.
4. Semua komisi diminta untuk segera menyampaikan Naskah Akademik dan draft RUU kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh Badan Legislasi.

Rapat ditutup pukul 15.15 WIB

Jakarta, 11 Juni 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001